

Analisis Dampak Dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Negara Terhadap Ekonomi Di Indonesia

Siti Amila¹, Aditya Agung Nugraha², Ahmad Sukron³, Farida Rohmah⁴

^{1,2,3,4} UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

e-mail : amilahsiti153@gmail.com¹, aditya.agung.nugraha@uingusdur.ac.id²,
ahmad.sukron@uingusdur.ac.id³, farida.rohmah@uingusdur.ac.id⁴

ABSTRAK: Presiden Jokowi telah mengumumkan rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur. Pemindahan IKN ini harus direncanakan dengan matang karena terdapat potensi dampak positif beserta risiko. Latar belakang pemindahan IKN adalah beban DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis sudah terlampaui tinggi. Pemindahan IKN juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis dampak dan risiko pemindahan IKN terhadap ekonomi di Indonesia. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan jenis pendekatan deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah dampak positif serta risiko dipindahkannya IKN ke Kalimantan Tengah terhadap perekonomian di Indonesia. Kebijakan untuk memindahkan IKN dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk pengembangan wilayah ekonomi baru, menurunkan ketimpangan antar-wilayah, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kata kunci: Dampak ekonomi dan risiko, pemindahan ibu kota negara, Indonesia

ABSTRACT: President Jokowi has announced plans to move the country's capital city (IKN) to East Kalimantan Province. The transfer of this IKN must be carefully planned because there are potential positive impacts and risks. The background for the transfer of IKN is that the burden of DKI Jakarta as the center of government and business center has been too high. The transfer of IKN also aims to reduce economic inequality between Java and outside Java. This journal aims to analyze the impact and risk of IKN transfer on the economy in Indonesia. The qualitative research method is a research method carried out with a descriptive type of approach. The results obtained are the positive impact and risk of moving IKN to Central Kalimantan on the Indonesian economy. The policy to move IKN was motivated by the need to develop new economic areas, reduce inter-regional inequality, and improve people's welfare.

Keywords: Economic impact and risk, relocation of the national capital, Indonesia

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, dimana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Presiden dipilih langsung oleh masyarakat. Indonesia disebut juga sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.487 pulau, oleh karena itu disebut sebagai Nusantara. Dengan populasi sebesar 237 juta jiwa pada tahun 2010. Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, meskipun secara resmi bukanlah negara Islam (Adinugraha, 2013). Di Indonesia terdapat lima pulau yaitu pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Serta mempunyai masyarakat plural terbesar terdiri dari bermacam-macam suku

bangsa, budaya dan agama. Indonesia terdiri dari 33 provinsi yang terbentang luas di khatulistiwa, dipisahkan oleh lautan luas dan kaya akan hasil alam (Villinds, 2018)

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1964, ditetapkannya Jakarta sebagai ibukota negara yang di sahkan tanggal 31 Agustus 1964 oleh presiden Soekarno pada saat itu. Semenjak dinyatakan sebagai ibu kota, penduduk Jakarta melonjak sangat pesat akibat kebutuhan tenaga kerja pemerintahan yang hampir semua terpusat di Jakarta (Raniasati et al., 2023). Pemerintah pun mulai melaksanakan program pembangunan proyek besar, seperti membangun pemukiman masyarakat, dan mengembangkan pusat-pusat bisnis kota.

Wacana pemindahan ibu kota negara sudah cukup lama, bahkan sejak era pemerintahan Presiden Sukarno, yang pernah melontarkan ide memindahkan ibukota negara ke Kalimantan Tengah. Persisnya ke kota Palangkaraya, yang dibelah oleh sungai Kahayan. Mimpi Presiden Soekarno untuk memindahkan ibukota negara itu dilontarkan pada tahun 1950-an. Saat itu, putra sang fajar tersebut sudah meramalkan bahwa Jakarta akan tumbuh tak terkendali. Ada beberapa pertimbangan Soekarno memilih Palangkaraya sebagai ibukota negara. Pertama, Kalimantan adalah pulau terbesar di Indonesia dan letaknya di tengah-tengah gugus pulau Indonesia. Kedua, menghilangkan sentralistik Jawa. Ketiga, pembangunan di Jakarta dan Jawa adalah konsep peninggalan Belanda, dan Soekarno ingin membangun sebuah ibu kota dengan konsepnya sendiri. Bukan peninggalan penjajah, tapi sesuatu yang orisinal.

Wilayah Kalimantan sudah dipandang sebagai kawasan ideal bagi penempatan wilayah ibu kota baru untuk menggantikan Jakarta. Selain wilayah yang luas, aman dari potensi gempa bumi, juga dianggap sebagai kawasan pertengahan Indonesia. Beberapa negara yang pernah melakukan pemindahan ibu Kota adalah Korea Selatan yang memindahkan pusat ibu kota dari seoul ke Sejong, Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, Amerika Serikat yang memindahkan pusat pemerintahan ke Washington dengan tetap menjadikan New York sebagai pusat perekonomian dan bisnis, Brazil yang memindahkan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasilia serta Turki yang memindahkan ibu kotanya dari Istanbul ke Ankara. Dan dari sekian banyak pengalaman pemindahan ibu kota tersebut menjadi catatan khusus dari Bappenas RI, seperti pemindahan ibu kota Australia ke Canberra yang tidak menimbulkan efek perkembangan wilayah yang berarti, serta pemindahan ibu kota Malaysia ke Putrajaya yang jaraknya terlalu dekat sehingga dampak positif dari pemindahan ibu kota tersebut tidak signifikan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dari ibu kota sebelumnya (Shalih et al., 2018).

Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia merupakan hal yang sangat efektif untuk pemerataan ekonomi di Indonesia. Pidato Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 Agustus 2019 secara langsung mengumumkan pemindahan ibu kota negara ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di Kutai kartanegara (Kukar) dan Penajam Paser Utara (PPU) sebagai lokasi pemindahan ibu kota baru nantinya.

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur menyisakan sejumlah tanda tanya, bagaimana grand design dari sebuah ibu kota negara nantinya. Sejumlah permasalahan menjadi dasar mengapa pemindahan ibu kota harus disegerakan. Pertama, yaitu kepadatan penduduk terutama di wilayah Jakarta dan pulau Jawa. Kedua, Kesenjangan pembangunan antar wilayah yang juga menjadi alasan kuat pemindahan Ibu Kota Negara (Shalih et al., 2018).

Dampak pemekaran yang akan terjadi pada lokasi ibukota negara yang baru yakni dengan melihat adanya asumsi variabel dan menentukan wilayah yang paling memberi tarikan dan membawa dampak pertumbuhan ke sekitarnya, guna bermanfaat untuk perekonomian nasional. Sejauh ini, Jakarta masih mendominasi perputaran ekonomi di Indonesia. Beberapa pihak mengklaim dengan adanya perpindahan ibukota, maka perekonomian menjadi lebih merata, tidak hanya terpusat di pulau Jawa saja.

Dalam perpindahan ibukota negara juga berpengaruh terhadap inflasi hanya saja karena proyek ini dilakukan secara bertahap maka dampak yang ditimbulkan tidak terlalu

signifikan. Untuk dampak yang akan terjadi pada pertumbuhan ekonomi, tergantung dari tahapan perencanaan. Apabila perencanaan yang dilakukan benarbenar matang, efek pertumbuhan ekonomi perkiraan dapat tumbuh dalam kurun waktu 5 tahun. Dalam kajian yang telah dilakukan pemindahan ibukota mampu meningkatkan perekonomian 0,1-0,2% karena adanya dorongan investasi baru (Hasibuan, 2019).

Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN (IKN) disahkan DPR pada 18 Januari 2022 dan kemudian Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi telah menandatangani UU IKN pada 15 Februari 2022. Penetapan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN baru menjadi modalitas penting untuk mendorong pemerataan pertumbuhan khususnya di kawasan timur Hal didukung dengan tingkat realisasi investasi domestik dan asing yang paling tinggi seKalimantan maupun dengan wilayah Timur Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2020). Data menunjukkan bahwa Pulau Kalimantan menyumbang 13,64% (Rp52.704.9 miliar) realisasi PMDN dan 7,56% (US\$2.131,4 juta) realisasi PMA nasional pada tahun 2019. Salah satu latar belakang pemindahan IKN adalah untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah di luar Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia sehingga aktivitas-aktivitas ekonomi yang tadinya berpusat di Pulau Jawa dapat berpindah ke Pulau di luar Jawa. Berikut merupakan tabel Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2021-2045 yang menunjukkan kesenjangan ekonomi yang tidak merata.

Tabel 1. Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2021-2045

Wilayah	Presentase persebaran jumlah penduduk secara nasional (%)	Kontribusi Ekonomi untuk nasional (%)
Pulau Jawa	57%	59,0%
Pulau Sumatera	22%	21,31%
Pulau Kalimantan	6%	8,05%
Pulau Sulawesi	7,4%	6,33%
Bali & Nusa Tenggara	5,6%	3,06%
Maluku & Papua	2,8%	2,24%

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 Hasil Supas 2015 (angka tahun 2019) & BPS (Feb 2020)

Jika pertumbuhan ekonomi dibiarkan tumbuh lebih dominan di Pulau Jawa, maka akan menimbulkan disparitas pertumbuhan ekonomi regional. Konsekuensi dari adanya gap pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan kesenjangan antar daerah yang semakin meningkat. Apabila melihat pembelajaran negara-negara yang telah melakukan Pemindahan Ibu Kota telah memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian negara, seperti Negara Brazil dari Rio De Jainero ke Brasilia pada tahun 1957 sampai 1960 menunjukan peningkatan Jumlah Penduduk sebanyak 4.5 Juta jiwa (2019) dibandingkan pada saat pertama pemindahan sekitar 136 ribu jiwa (1960) kemudian peningkatan GDP \$ 51.715.862 (2015). Contoh lain adalah pemindahan IKN Australia dari Melbourne ke Canberra, sejak 1920 – 1989 menunjukkan perkembangan yaitu peningkatan jumlah Penduduk 426.700 jiwa (2019) dibandingkan saat awal pemindahan sekitar 5.915 jiwa (1927) dengan peningkatan GDP \$ 39.440.000 (2018). Kewajiban negara atau pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan umum dalam suasana sebesar-besarnya kemakmuran menurut asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Menurut J. Barents ada tigas tujuan negara yaitu: (i) untuk memelihara ketertiban dan ketentraman (ii) mempertahankan kekuasaan dan (iii) mengurus hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan-kepentingan umum campur tangan pemerintah yaitu menjamin agar kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak menimbulkan dan ketidaksetaraan didalam masyarakat dan memastikan agar pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan dengan efisien (Saraswati & Adi, 2022).

Kebijakan untuk memindahkan IKN dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk pengembangan wilayah ekonomi baru, menurunkan ketimpangan antar-wilayah, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan proyek pemindahan IKN juga sekaligus merespons potensi konflik sosial dan merosotnya daya dukung ekologis.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Teknik analisis deskriptif kualitatif, dimana prosedur penelitian mengandalkan dokumentasi berupa iklan di media televisi, serta menggunakan teori-teori dari buku sebagai literatur. Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan akan berfokus terhadap dampak dan resiko pemindahan ibu kota negara terhadap ekonomi di Indonesia. Teknik pengumpulan data pada kajian ini menggunakan pendekatan analisis *library research*, dimana untuk menganalisis tentang perubahan ibu kota negara, perlu adanya referensi yang terkait baik berupa updating baik koran, majalah atau yang lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan secara detail dan mendalam terhadap objek kajian yang diteliti, yakni Berita dari berbagai media baik online maupun dari televisi. Data dokumen yang digunakan pada penelitian ini berupa tayangan berita yang diunduh melalui internet. Selanjutnya ada data pendukung yang berasal dari tangan kedua atau ketiga, dan dalam penelitian ini data pendukung yang peneliti gunakan adalah kajian pustaka dari buku-buku, ataupun literatur lain yang terkait dengan pembahasan skripsi. Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan analisis semiotik sebagai acuan dalam menggali fenomena tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum IKN Baru

Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ibu kota Palangkaraya, terletak antara 0°45' Lintang Utara s.d. 3°30' Lintang Selatan dan 111° s.d. 116° Bujur Timur. Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua dengan luas wilayah mencapai mencapai 153.564 Km² (Kehutanan, n.d.) (Jailani et al., 2022). Setelah berpisah dengan induknya Kalimantan Selatan, berdasarkan Keppres No.10/1957 tanggal 23 Mei 1957. Latar belakang berdirinya adalah sebagai wujud apresiasi rezim Soekarno terhadap peran serta masyarakat Dayak yang mayoritas non-Muslim dalam pembangunan. Sebelumnya, Kalimantan Tengah diperjuangkan lewat diplomasi oleh Alm Tjilik Riwut dan kawan-kawan, dan perjuangan berdarah-darah, lewat pemberontakan bersenjata Gerakan Mandau Talawang Pancasila (GMTPS) yg dipimpin oleh Alm. Cristian Simbar. Saat ini Kalimantan Tengah terdiri dari 13 kabupaten dan 1 Kota Madya (Yahya, 2018).

Masyarakat asli Kalimantan Tengah, yaitu "Uluh Dayak" umumnya berpencaharian sebagai petani/nelayan tradisional. Biasanya, orang Dayak tidak berprofesi tunggal. Misalnya; pekerjaan tetapnya menyadap karet, selain itu juga mengurus kebun. Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah adalah masyarakat yang egaliter, terbuka dan toleran terhadap pengaruh budaya asing. Kalau kita berkunjung hingga jauh kewilayah pedalaman, tidak ada perbedaan berarti antara orang Dayak dengan etnis lain di Indonesia. Perbedaan utama yang bisa kita jumpai hanyalah perbedaan bahasa saja. Salah satu keistimewaan Kalimantan Tengah adalah, meski sampai kepedalaman, kita tetap bisa berkomunikasi dengan mereka dengan Bahasa Indonesia (Yahya, 2018).

3.2 Urgensi Pemindahan IKN di Indonesia

Dalam upaya pemindahan ibu kota negara (IKN) tentu harus mempertimbangkan dampak serta manfaat dari pindahnya ibu kota negara ke lokasi yang baru. Jika melihat kondisi sekarang yang terjadi di ibu kota, Jakarta memiliki beban berat untuk menjalankan roda perekonomian serta roda pemerintahan sekaligus, tampaknya menjadi suatu keputusan yang tepat jika Indonesia mengupayakan untuk memindahkan ibu kota negaranya ke lokasi baru yang lebih strategis dan bisa dikembangkan, dalam hal ini Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara (Pujianto & Adinugraha, 2022). Pemindahan ibu kota harus dimulai dari pertimbangan perencanaan yang paling efisien.

Melihat rencana panjang dan gerak cepat Jokowi untuk memindahkan IKN di atas, perlu dipahami urgensi pemindahan IKN. Pertama, menghadapi tantangan masa depan. Sesuai dengan Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju, ekonomi Indonesia akan masuk 5 besar dunia pada tahun 2045. Pada tahun itu diperkirakan PDB per kapita sebesar US\$ 23.119. Tahun 2036, diperkirakan Indonesia akan keluar dari *middle income trap*. Oleh sebab itu dibutuhkan transformasi ekonomi untuk mencapai Visi Indonesia 2045. Transformasi ekonomi didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi yang dimulai dari tahun 2020-2024. Oleh sebab itu dibutuhkan IKN yang dapat mendukung dan mendorong transformasi ekonomi tersebut.

Kedua, IKN harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata termasuk di Kawasan Timur Indonesia. Selama ini, Jakarta dan sekitarnya terkenal dengan pusat segalanya (pemerintahan, politik, industri, perdagangan, investasi, teknologi, budaya dan lain-lain). Tidak mengherankan jika perputaran uang di Jakarta mencapai 70% yang luasnya hanya 664,01 km² atau 0.003% dari total luas daratan Indonesia 1.919.440 km². Sementara jumlah penduduknya 10,56 juta jiwa atau 3,9% dari jumlah penduduk Indonesia 270,20 juta jiwa (data tahun 2020).

Hal ini menyebabkan ketidakmerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Pembangunan tersentralisasi di Jakarta dan pulau Jawa. Kondisi ini kurang baik untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diharapkan *sustainable*, tidak termanfaatkannya potensi daerah secara optimal, kurang mendukung keadilan antara daerah, dan rentan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.

Oleh sebab itu dibutuhkan IKN yang dapat menjawab tantangan tersebut yaitu kota yang berkelas dunia untuk semua rakyat Indonesia. IKN yang berlokasi di Kalimantan diharapkan "pusat gravitasi" ekonomi baru di Indonesia termasuk di kawasan tengah dan timur Indonesia. IKN baru diharapkan dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memaksimalkan potensi sumber daya daerah.

Ketiga, kondisi objektif Jakarta yang tidak cocok lagi sebagai IKN. Hal ini bisa dilihat dari "beban" yang harus ditanggung Jakarta antara lain 1) kepadatan penduduk 16.704 jiwa/km² sementara kepadatan penduduk Indonesia hanya 141 jiwa/km². 2) Kemacetan Jakarta yang merupakan kota termacet nomor 10 di dunia tahun 2019 walau menurun menjadi nomor 31 dari 416 kota besar di 57 negara tahun 2020 (*TomTom Traffic Index*). 3) permasalahan lingkungan dan geologi yang telah akut antara lain banjir yang setiap tahun melanda Jakarta dan terjadinya penurunan tanah yang mengakibatkan sebagian wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut.

Pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan pasti membawa pro dan kontra. Namun sebagai negara demokrasi, ketika Negara telah memutuskan memindahkan IKN dengan proses demokrasi melalui UU, seharusnya seluruh komponen bangsa mendukungnya. Bangsa Indonesia perlu meminimalisasi eksese pemindahan IKN. Tidak ada satu keputusan apapun yang memuaskan seluruh rakyat, namun keputusan yang memberikan manfaat lebih besar kepada bangsa Indonesia harus didukung sebagai wujud kecintaan dan bakti untuk NKRI (Edward UP Nainggolan, Kakanwil DJKN, 2022).

3.3 Dampak Dan Resiko Pemindahan IKN Terhadap Perekonomian

Bappenas dalam kajiannya menyatakan bahwa pemindahan IKN akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional dengan prediksi kenaikan PDRB sebesar 0,1%. Bappenas menyatakan bahwa kenaikan PDRB bersumber dari pemanfaatan sumberdaya daya potensial seperti pembukaan lahan untuk keperluan infrastruktur produktif dan pembukaan lapangan kerja bagi sumberdaya manusia terampil yang selama ini belum termanfaatkan. Secara spesifik Bappenas memperhitungkan akan terjadi peningkatan upah tenaga kerja bagi wilayah sekitar yang dicerminkan dengan kenaikan *price of labour* sebesar 1,37% (Bappenas, 26 juni 2019).

Di Indonesia kurang lebih 54,54% kegiatan ekonomi terpusat di pulau Jawa. Sebesar 21,58% di Sumatera, 8,20% di Kalimantan, 3,05% di Bali, Nusa Tenggara 6,22%, dan Sulawesi, Maluku serta Papua sebesar 2,57%. Untuk itu, perpindahan ibu kota ke wilayah yang lebih sempurna agar pembangunan di Indonesia lebih merata (Kristianto, 2022).

Perpindahan pusat pemerintah ke Kalimantan akan berkontribusi banyak terhadap perkembangan ekonomi di pulau Kalimantan khususnya provinsi Kalimantan Timur itu sendiri. Selain itu, bisa mengembangkan perdagangan antardaerah, terutama perdagangan antara pulau Jawa serta Kalimantan, sehingga terbentuk nilai ekonomi yang lebih maju. Perpindahan ibu kota baru ini akan lebih optimal jika didukung oleh produktivitas, inovasi, serta teknologi yang baik.

Pemindahan ibu kota akan menimbulkan tambahan inflasi nasional minimal 0,3% meskipun nantinya tekanan dari sisi permintaan akan meningkat. Kenaikan inflasi berasal dari perbaikan pendapatan masyarakat yang tentunya juga diikuti oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Namun inflasi tersebut diperkirakan tidak akan terlalu mempengaruhi daya beli secara nasional karena kenaikan harga hanya terpusat di lokasi IKN baru dan wilayah sekitarnya. Diharapkan juga persiapan infrastruktur yang lebih baik serta sektor produksi yang relatif bermacam-macam. Tentunya dalam pembangunan ibu kota baru tersebut pastinya bakal menarik banyak tenaga kerja baru sehingga bisa mengurangi jumlah pengangguran serta menurunkan angka kemiskinan. Kesempatan dari warga sekitar serta investor merupakan salah satu manfaat ekonomi yang dapat dirasakan secara langsung. Diharapkan nantinya akan banyak para investor yang menginvestasikan sahamnya.

Pemindahan ibu kota negara ke luar Jawa akan mengembangkan perdagangan antardaerah di Indonesia. Lebih dari 50% daerah Indonesia akan merasakan kenaikan arus perdagangan jika ibu kota negara dipindah. Perpindahan ibu kota negara juga akan mendesak investasi di provinsi ibu kota baru dan sekitarnya. Selain itu, perpindahan ibu kota akan memberikan dorongan investasi yang lebih luas pada daerah lain dan dapat meningkatkan output (Giating Khoiriamal et al., 2022).

Pembangunan daerah seluas kurang lebih 256.000 hektare menghabiskan dana total sekitar Rp466 triliun yang diambil dari APBN sebesar 53,5% serta 46,5% sisanya diambil dari KPBU, BUMN, serta swasta. Tetapi, untuk saat ini dana APBN difokuskan untuk menangani Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional. Nantinya pemerintah akan meningkatkan sektor baru semacam industri pertanian, industri teknologi, farmasi, wisata, bahan kimia serta produk kimia, dan energi rendah karbon. Selain itu akan tetap mengembangkan sektor yang telah ada seperti pertambangan, wisata, pertanian, serta perkebunan (Kristianto, 2022).

Dengan bauran kebijakan tersebut, pemindahan IKN diprediksi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional dengan tingkat inflasi yang terjaga (Alinda & Adinugraha, 2022). Secara agregat kesejahteraan masyarakat di lokasi IKN baru akan meningkat dan berpotensi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.

Selain potensi ekonomi, pemindahan IKN juga memiliki risiko yang harus diantisipasi oleh Pemerintah. Risiko pertama terkait pembiayaan dari keperluan pemindahan IKN.

Bappenas memperhitungkan bahwa ada dua skenario kebutuhan total pembiayaan berdasar desain dari IKN, yaitu sebesar Rp466 Triliun dan Rp323 Triliun. Skenario kebutuhan pembiayaan sangat bergantung kepada fungsi pemerintahan dan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dipindahkan (Bappenas, 26 Juni 2019).

Proyek pembangunan 'kota baru' menuntut penyediaan infrastruktur yang masif. Karakteristik proyek infrastruktur adalah memiliki risiko jangka panjang terutama berasal dari kinerja proyek yang belum tentu sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Di sisi lain pihak swasta tentu mengharapkan realisasi keuntungan yang sesuai dengan kalkulasi di awal proyek.

Sementara dari sisi makro, Ikatan Pengusaha *Real Estate* Indonesia (REI) memperkirakan kontribusi inflasi terbesar berasal dari kenaikan harga lahan, apalagi terdapat luasan lahan yang dikuasai hanya oleh beberapa pihak. Penggunaan lahan tersebut dapat dilakukan dengan skema pendayagunaan aset yang tidak membebani anggaran negara. Dengan demikian risiko tingginya inflasi yang berasal dari kenaikan harga lahan dapat diminimalisir (Silalahi, 2019).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa pemindahan IKN memiliki dampak serta resiko terhadap perekonomian di Indonesia. Pemindahan IKN memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan tingkat inflasi yang tetap rendah. Selain itu pertumbuhan wilayah industri dengan rantai nilai hingga hilir akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya akan menurunkan ketimpangan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Pemindahan IKN juga memiliki risiko terutama bersumber dari kebutuhan pembiayaan. Skema pembiayaan untuk pembangunan 'kota baru' beserta infrastrukturnya memiliki risiko jangka panjang apalagi sebagai pusat pemerintahan. Pemerintah selayaknya memperhatikan aspek perencanaan dan tata ruang wilayah sehingga penggunaan lahan dapat efektif dan meminimalisir kemungkinan inflasi dari kenaikan harga lahan yang tidak terkendali. DPR RI secara berkelanjutan harus memantau perkembangan pembangunan IKN baru melalui mekanisme pengawasan yang melibatkan Komisi V (infrastruktur), Komisi XI (keuangan), dan komisi terkait lainnya.

5. REFERENSI

- Adinugraha, H. H. (2013). The Economic of Umar Bin Khattāb Policy in Modern Economic Policy. *The First International Conference on Law, Business and Government*, 83–89.
- Alinda, R., & Adinugraha, H. H. (2022). Pengaruh Logo Halal, Kesadaran Halal, Dan Sikap Konsumen Untuk Kembali Membeli Produk Makanan Dan Minuman Kemasan. *SOSEBI: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis Islam*, 2(2). <https://doi.org/10.21274/sosebi.v2i2.6298>
- Bappenas, M. P. P. N. (2019). *Dampak Ekonomi dan Skema Pembiayaan Pemindahan Ibu Kota Negara*.
- Detik, O., Dan, C. O. M., Co, R., & Ilmawan, M. I. (2020). *Negara Republik Indonesia Di Portal Berita Program Studi Jurnalistik 1441 H / 2020 M*.
- Edward UP Nainggolan, Kakanwil DJKN, K. K. B. (2022). *Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara*.
- Giating Khoirimal, Zaidan Zulfa Athallah, Wildan Dzikri Basilla, & Hendri Hermawan

- Adinugraha. (2022). Pelatihan Pembukuan Sederhana Dan Strategi Pemasaran Pada UMKM Di Desa Podosugih. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesosi*, 5(2). <https://doi.org/10.57213/abdimas.v5i2.68>
- Hasibuan, R. R. A. (2019). Dampak Dan Resiko Perpindahan Ibu Kota Terhadap Ekonomi Di Indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 53(9), 1689–1699.
- Jailani, N., Kuart Ismanto, Susminingsih, & Adinugraha, H. H. (2022). An Opportunity To Develop Halal Fashion Industry In Indonesia Through E-Commerce Platform. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.24239/tadayun.v3i2.76>
- Kehutanan, D. (n.d.). *Letak, Batas dan Luas Wilayah*.
- Kompas. (2019). *Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara*. Kompas. https://www.kompas.id/baca/utama/2019/08/27/urgensi-pemindahan-ibu-kota/?status=sukses_login&utm_source=kompasid&utm_medium=login_paywall&utm_campaign=login&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.kompas.id%2Fbaca%2Futama%2F2019%2F08%2F27%2Furgensi-pemindahan-ibu-k
- Kristianto, A. (2022). *Perpindahan Ibu Kota Berdampak Positif Terhadap Ekonomi Nasional*. <https://kumparan.com/tulisanqu19/perpindahan-ibu-kota-berdampak-positif-terhadap-ekonomi-nasional-1xLt8Q3DfjB/full>
- Nugroho Hanan. (2020). Pemindahan Ibu Kota Baru Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Kalimantan Timur: Strategi Pemenuhan Kebutuhan dan Konsumsi Energi. *Bappenas Working Papers*, III No. 1.
- Pujiyanto, E., & Adinugraha, H. H. (2022). Marketing Strategy for Convection Production Results in Samong Village, Ulujami District, Pemalang. *MUAMALATUNA*, 14(2). <https://doi.org/10.37035/mua.v14i2.6593>
- Raniasati, R., Ngaisah, Z. F. N., Adinugraha, H. H., & Nasarruddin, R. Bin. (2023). Hubungan Islam dan Negara dalam Perspektif Abdurrahman Wahid. *Aqlania*, 13(2). <https://doi.org/10.32678/aqlania.v13i2.7085>
- Sanjaya, A. R. (2020). Potensi Dampak Lingkungan Khususnya di Teluk Balikpapan Terhadap Pembangunan dari Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara. *Academia*.
- Saputra, S. D., Gabriel J, T., & Halkis, M. (2021). Analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Pertahanan (Studi Kasus Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta Ke Kutai Kartanegara Dan Penajam Paser Utara) Strategy Analysis Relocation Of The Capital Cit. *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, 7, 192.
- Saraswati, M. K., & Adi, E. ariananto W. (2022). Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Analisis Swot. *Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 6(2), 4042–4052.
- Shalih, O., Toun, N. R., Kebencanaan, B. T., Aprinae, O., Ito, Y., Faculty, I. S., Komiya, K., Kotani, Y., Supriyatno, M., & Yahya, M. (2018). Jurnal Academia Praja Volume 1 Nomor 1 - Februari 2018. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 14(1), 21.
- Silalahi, S. A. F. (2019). Dampak ekonomi dan risiko pemindahan ibu kota negara 19. *Info Singkat Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 9(16), 19–24.

Villinds, O. (2018). Analisis Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara/Pusat Pemerintahan. *Pendidikan*, 29.

Yahya, M. (2018). Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 14(1), 21. <https://doi.org/10.23971/jsam.v14i1.779>